



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : LEGISLATIF

LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

UNIT KERJA : FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASEP SURYA ATMAJA
2. Jabatan : ANGGOTA DPRD
3. NHK : 620398

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.330.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m²/23 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m²/23 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/120 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 755.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/120 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 755.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m²/23 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m²/23 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 62 m²/50 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m²/30 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
9. Tanah Seluas 66 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
10. Tanah Seluas 66 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 180.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FJ 40 JEEP Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp.

100.000.000

2. MOBIL, KIA K2700 MINI BUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.

80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. 100.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 180.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.790.000.000

III. HUTANG

Rp. 1.041.600.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.748.400.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.